

KIM

Rutan Purbalingga Ikuti Kegiatan Peningkatan Nilai Maturitas SPIP & Manajemen Risiko

Ari Setiawan - PURBALINGGA.KIM.WEB.ID

Jan 26, 2024 - 10:23





Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan fokus peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi dan peningkatan nilai maturitas SPIP merupakan target kinerja Kantor Wilayah.

Komitmen itu kemudian mendorong Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah bekerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah untuk mengadakan kegiatan Peningkatan Nilai Maturitas SPIP dan Implementasi Manajemen Risiko yang dihadiri oleh Kasubsi Pengelolaan Rutan Purbalingga, Yowan dan staf bertempat di Aula Kresna Basudewa, Kamis (25/01).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menerapkan SPIP. Tejo menerangkan SPIP telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.

"Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penilaian risiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya," kata Tejo.

Melalui tindakan pengawasan dan manajemen risiko, terang Tejo, organisasi pemerintah harapannya terhindar dari praktik kecurangan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, upaya implementasi manajemen risiko di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah perlu dikembangkan lebih lanjut," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Tri Handoyo mengatakan inti dari seluruh instrumen SPIP dan Manajemen Risiko terdapat pada nilai integritas.

Mengutip quote Samuel Johnson, Tri mengatakan bahwa integritas tanpa pengetahuan itu lemah, sementara pengetahuan tanpa integritas itu berbahaya dan menakutkan.

"Membangun dan melaksanakan tindakan pengawasan harus dimulai dari nilai integritas sebab kita harus kuat dari dalam diri sendiri sebelum mengawasi yang lain," kata Tri.

Perihal pengawasan, menurut Tri dibutuhkan komitmen kuat untuk meningkatkan nilai integrasi di unit kerja dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Harapannya seluruh rangkaian kegiatan hari ini semakin memupuk budaya integritas dalam hal pengawasan dan manajemen risiko di unit kerja kita masing-masing," tutup Tri.